

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Secara umum evaluasi adalah proses mencari data atau informasi tentang objek atau subjek yang dilaksanakan untuk tujuan pengambilan keputusan (Sukardi, 2015: 02). Sedangkan menurut Arikunto (2016: 01) evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Lalu Stufflebeam dan Shinkfield dalam Eko et al. (2017: 04) mengemukakan pengertian evaluasi:

Evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh dan memberikan informasi deskriptif serta penilaian tentang nilai dan kelebihan tujuan, desain, implementasi, dan dampak beberapa objek untuk memandu pengambilan keputusan, melayani kebutuhan untuk akuntabilitas, dan mempromosikan pemahaman tentang fenomena yang terlibat

Berdasarkan ketiga pengertian evaluasi di atas, secara garis besar memberikan pemahaman bahwa evaluasi sebagai langkah-langkah yang tersusun secara sistematis dan komperhensif untuk mengetahui data dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan memaknainya agar dapat dijadikan pertimbangan untuk menghentikan, melanjutkan, menambahkan atau mengurangi program.

Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program serta

untuk melihat hambatannya. Pernyataan di atas memunculkan istilah tentang evaluasi program. Evaluasi program merupakan evaluasi yang berkaitan erat dengan suatu program atau kegiatan pendidikan, termasuk diantaranya tentang kurikulum, sumber daya manusia, penyelenggara program, proyek penelitian dalam suatu lembaga (Sukardi, 2015: 03). Secara singkat Sukardi (2008: 03) mengatakan bahwa evaluasi program dilakukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Purwanto (2016: 24) evaluasi program adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan program. Samuel (2011: 06) menegaskan bahwa evaluasi program:

Setiap program pendidikan memiliki serangkaian tujuan yang dipikirkan dengan matang, tetapi tidak demikian. Oleh karena itu, kadang-kadang perlu bagi evaluator program untuk membantu verbalisasi dan memperjelas tujuan program untuk memastikan bahwa mereka, setidaknya, eksplisit. Selanjutnya, evaluator bahkan dapat diberikan pengembangan tujuan sebagai tugas utama

Tujuan evaluasi program adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi program dalam mencapai suatu tujuan. Zohrabi (2012: 60) secara jelas mengatakan bahwa *“It can be argued that program evaluation consisted of and was equal to investigating the efficiency and working of language teaching methods and materials”*. Untuk menentukan bahwa program efektif dan efisien maka diperlukan suatu tolak ukur yang menjadi dasar evaluasi. Adapun yang menjadi tolak ukur dalam evaluasi program menurut Marvin (2004: 97) adalah:

- 1). Apakah hasil suatu proyek sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 2) Ketersediaan sarana untuk mencapai tujuan tersebut, 3) Apakah sarana atau kegiatan benar-benar dapat dicapai atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan, 4) Apakah sarana yang disediakan benar-benar dilakukan untuk tujuan semula, 5) Berapa persen jumlah atau luas sasaran sebenarnya yang dapat dijangkau oleh program, 6) Bagaimana

mutu pekerjaan atau sasaran yang dihasilkan oleh program (kualitas hidup, kualitas barang), 7) Berapa banyak sumber daya dan kegiatan yang dilakukan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal, 8) Apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan masukan terhadap perubahan yang diinginkan.

Program yang dikeluarkan pemerintah sudah semestinya dievaluasi, untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Seiring dengan diselenggarakannya program pendidikan formal, maka program pendidikan noformal juga turut mendampingi program pendidikan sebagai pelengkap dalam memecahkan masalah pendidikan yang tidak merata dan tidak tersentuh pada wilayah formal. Evaluasi program pendidikan nonformal mencakup pula pengukuran (measurement) terutama dalam menilai keluaran (output) dan pengaruh (outcome) program pendidikan nonformal (Sudjana, 2006: 18). Lebih lanjut Sudjana (2006: 18) mengatakan pengaruh adalah manfaat yang dialami lulusan dalam peningkatan kesejahteraan hidup, pembelajaran orang lain, dan partisipasinya dalam pembangunan masyarakat.

Evaluasi program pendidikan nonformal dilakukan terhadap komponen, proses, dan tujuan program, serta terhadap fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian, dan pengembangan dalam manajemen program pendidikan nonformal (Sudjana, 2006: 12). Dari pengertian di atas evaluasi program pendidikan nonformal mencakup sebuah cara untuk mengukur keberhasilan program pendidikan nonformal terkait tujuan yang sudah direncanakan, dan untuk melihat efek dari program terhadap keberfungsian serta kemampuan masyarakat untuk memperoleh kesempatan dalam memberdayakan diri. Berbagai macam program pendidikan telah

diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu, termasuk lembaga pendidikan nonformal yang bergerak di wilayah sosial. Menjadi sangat penting untuk dilakukan evaluasi program untuk mengukur tingkat keberhasilannya.

b. Fungsi Evaluasi

Evaluasi menjadi langkah penting dalam menentukan sebuah program, sebab pelaksanaannya memiliki beragam fungsi. Fungsi utama evaluasi adalah memberikan data informasi yang benar mengenai pelaksanaan suatu program sehingga penyelenggara program dapat mengambil keputusan yang tepat, apakah program itu diteruskan, ditunda, atau sama sekali tidak dilaksanakan lagi (Ikku, 2011: 160). Selanjutnya Areti (2014) berpendapat bahwa evaluasi berfungsi dalam berbagai konteks profesional dalam kegiatan sehari-hari untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang kompleks terutama peningkatan penekanan pada hasil. Kemudian Bazargan dalam Ramezan (2012: 255) mencatat fungsi dan aplikasi pendidikan yang paling penting dalam evaluasi sebagai berikut:

1) Memperhatikan tujuan dan apa yang harus dicapai melalui prosedur pendidikan; 2) Mendukung silabus yang ditentukan dan menghilangkan kekurangannya untuk mencapai tujuan pendidikan; 3) Menekankan solidaritas para peserta dan karenanya mencapai tujuan pendidikan; 4) Membuka jalan untuk memperbaiki sistem, atmosfer dan memperluas sumber daya manusia yang sesuai dan dengan demikian meningkatkan dan mengembangkan masyarakat, ekonomi dan budaya di dalam negeri; 5) Merasa bertanggung jawab atas prosedur pendidikan dan memastikan individu dan masyarakat dari kegiatan ini; 6) Mengumumkan prosedur pendidikan

Lebih lanjut Fakhruddin (2011: 22) mencoba menjelaskan bahwa fungsi evaluasi adalah:

1). Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat; 2). Menilai Apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; 3). Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar; 4). Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan dimensi program yang jalan, mana program yang tidak berjalan.

Fungsi evaluasi tidak hanya dilihat dari hasil yang dicapai, namun lebih menyeluruh mengenai beberapa aspek yang mempengaruhi ketercapaian suatu program. Dilihat dari konteks program, perencanaan, pelaksanaan hingga sampai pada hasil dan dampak yang ditimbulkan.

c. Tujuan Evaluasi

Evaluasi memiliki tujuan penting terhadap kemajuan bidang keilmuan. Salah satunya adalah tentang bagaimana evaluasi dalam bidang pendidikan. Menurut Anas dan Sudijono (2012: 16) tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan berdasarkan pada:

1. Tujuan Umum: (a) Mengumpul bahan keterangan yang akan digunakan sebagai bukti tahap pembangunan atau tahap kemajuan yang dialami oleh para peserta didik; (b) Untuk menentukan tahap keberkesanan kaedah pengajaran yang telah digunakan dalam tempo tertentu.
2. Tujuan khusus: (a) Merangsang aktiviti peserta didik dalam mengambil program pendidikan; (b) Untuk mencari dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan bukannya keberhasilan peserta didik dalam menyertai program pendidikan, supaya mereka dapat dicari dan mencari jalan keluar atau cara untuk memperbaikinya.

Tujuan evaluasi pendidikan tidak hanya menyangkut satu aspek saja, namun ada beberapa aspek yang mesti diperhatikan. Kajian yang dilakukan jauh lebih kompleks. Ada beberapa unsur yang inheren di dalamnya, mulai dari: pendidik, siswa, materi, sarana/ prasarana, biaya dan unsur-unsur lain yang mempengaruhi. Namun tetap pada substansi evaluasi, yakni melakukan penilaian untuk melihat

sejauh mana tingkat keberhasilan dan tidak keberhasilannya, baik ketika perencanaan, pelaksanaan hingga hasilnya.

d. Model Evaluasi

Model evaluasi telah ditemukan oleh berbagai pakar evaluasi demi memudahkan para teoritis dan praktisi untuk melakukan kegiatan evaluatif. Model evaluasi terus berkembang menyesuaikan kebutuhan evaluator dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ada beberapa model evaluasi program yang dapat digunakan (Arikunto, 2016: 40):

1) Goal Oriented Evaluation Model

Model ini dikembangkan oleh Tyler dan digunakan untuk mengamati tujuan program yang sudah direncanakan sebelumnya secara berkesinambungan dan terus menerus serta melihat sejauh mana tujuan tersebut terlaksana. Model evaluasi Tyler dikenal dengan evaluasi berbasis tujuan yang secara umum mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh suatu kebijakan, program atau proyek dapat dicapai atau tidak (Wirawan 2011:81).

Model evaluasi ini lebih memfokuskan pada tujuan yang sudah direncanakan sebelum menyelenggarakan program. Tujuan awal menjadi patokan untuk melihat apakah tujuan itu sudah terlaksana hingga terus dilakukan monitoring secara ketat.

2) Goal free Evaluation Model

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Michael Scriven, adalah model evaluasi yang memperhatikan bagaimana kerjanya program, dengan

mengidentifikasi penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif maupun hal negatif. Evaluasi ini sering pula disebut dengan evaluasi lepas dari tujuan, dalam arti tidak melepaskan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya, tetapi hanya mengesampingkan tujuan khusus dan hanya mempertimbangkan tujuan umum yang dicapai oleh program.

Evaluasi bebas tujuan tidak berarti melupakan tujuan sama sekali atau tidak memberikan batasan kepada evaluator, bahkan melarang untuk melupakan tujuan program, tetapi memberikan peringatan agar tidak bekerja terlalu rinci pada tujuan khusus yang dapat menjurus pada tujuan yang umum (Arikunto, 2008: 53).

3) Formatif-sumatif Evaluation Model

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Michael Scriven, berbeda dengan model evaluasi pertama, model evaluasi ini tidak terlepas dari tujuan. Terdapat dua model evaluasi yang digunakan, yakni evaluasi formatif dan sumatif.

a. Evaluasi formatif

Evaluasi yang dilakukan ketika program sedang berjalan, Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh program yang sudah dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan apa saja yang di temui, karena dengan mengetahui hambatannya, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan secara dini guna mengadakan perbaikan yang mendukung pencapaian tujuan program.

b. Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah program berakhir, untuk melihat hasil akhir yang diperoleh. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur ketercapaian program. Apakah program berjalan efektif atau tidak. Sehingga diperoleh informasi untuk melakukan suatu kebijakan apakah program dihentikan, dilanjutkan, atau dimodifikasi.

4) *Countenance Evaluation Model*

Model ini dibangun oleh stake. Penilaian yang menunjukkan bahawa pada pelaksanaan penilaian terdapat dua masalah utama yang harus dipertimbangkan, yaitu: 1) Deskripsi dan (2) pertimbangan; dan membedakan tiga peringkat dalam penilaian program, yaitu (a) pendahuluan - yang ditafsirkan sebagai konteks (b) transaksi atau proses (c) output atau hasil. Model *countenance evaluasi* secara meluas mempunyai dua ciri utama yang termasuk dalam "Matriks data", iaitu matriks perihalan dan matriks keputusan, setiap matriks dibahagikan kepada dua lajur yaitu lajur destinasi dan lajur pemerhatian (Sukardi, 2012: 60).

Evaluasi Countenance Model, mendorong evaluator untuk melihat konteks terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan suatu kegiatan. Mengetahui gambaran/kondisi secara mendalam serta faktual di lapangan agar menjadi bahan pertimbangan yang tepat ketika merumuskan suatu perencanaan.

5) CSE-UCLA Evaluasi Model

Model ini dikemukakan oleh Fernandes bahwa model UCLA-CSE dibagi menjadi empat peringkat, yaitu: (a) keperluan penilaian: menentukan masalah, (b) perancangan program: peringkat perancangan dinilai untuk menentukan sama ada rancangan pembelajaran telah diatur berdasarkan keputusan analisis keperluan tanpa mengira matlamat yang telah dirumuskan, (c) penilaian formatif: perhatian terhadap pelaksanaan program, (d) penilaian sumatif: untuk mengetahui apakah objektif yang dirumuskan dalam program telah dicapai, dan jika ia tidak dicari bagian-bagian mana yang belum dan apa yang menyebabkannya.

Model penilaian UCLA-CSE adalah penilaian yang membagikan kepada lima peringkat, yaitu: a) perancangan; b) pembangunan; c) pelaksanaan; d) keputusan; dan e) kesan (Arikunto, 2016: 44). Tahapan dalam model evaluasi ini dapat membantu penentu kebijakan untuk melihat sejauh mana tujuan program terimplementasikan.

6) CIPP Evaluation Model

Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk. CIPP adalah singkatan dari Konteks, Input, Proses dan Produk, model evaluasi C.I.P.P sangat populer dikalangan evaluator, karena digunakan diberbagai bidang, seperti pendidikan, manajemen dan perusahaan. Menurut Guili et al. (2011: 61) Dalam pengaturan pendidikan, model evaluasi CIPP telah digunakan untuk mengevaluasi berbagai proyek dan entitas pendidikan. Khusus dalam proyek pendidikan Evaluasi C.I.P.P memang sering

digunakan. Guili Zhang et al. (2011: 61) mencoba menjawab pertanyaan mengapa apa yang dapat dilakukan dengan model evaluasi C.I.P.P

Secara Khusus komponen penilaian konteks tentang konteks produk, input, proses dan model penilaian dapat membantu mengenal pasti keperluan pembelajaran penyedia perkhidmatan dan keperluan masyarakat. Komponen penilaian input kemudian dapat membantu menetapkan projek responsif yang dapat menjawab keperluan yang dikenal pasti. Selain itu, komponen penilaian proses memantau proses projek dan halangan prosedur yang berpotensi, dan mengenal pasti keperluan untuk pelarasan projek. Akhir sekali, komponen penilaian produk mengukur, menafsirkan, dan menilai hasil projek dan mentafsirkan kekuatan, nilai, kepentingan, dan kejujuran mereka.

Model C.I.P.P lebih sistematis kerana memulau dengan melihat konteks program, pandangan awal tentang hal substansial, yang kemudian akan berkaitan dengan input, proses dan produk program. Secara lengkap akan dijelaskan mengenai keempat komponen evaluasi Konteks, input, proses dan produk.

a. Evaluasi konteks

Evaluasi konteks menurut Stufflebeam (1983: 128) *Evaluasi konteks ini bertujuan untuk menguji tujuan dan keutamaan yang disediakan sesuai dengan keperluan siapa yang disampaikan. Walau apapun objek tempatannya, hasil penilaian konteks mesti memberikan asas yang kokoh untuk menyesuaikan pernyataan dan keutamaan yang ada dan menargetkan perubahan yang diperlukan.* Evaluasi konteks dapat juga dikatakan sebagai penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan program, kebutuhan yang belum dipenuhi, karakteristik

populasi dan sampel dari individu yang dilayani dan tujuan program (Sax dalam Eko et al, 2017: 177). Lalu ditegaskan bahwa Evaluasi konteks dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1). Apa kebutuhan yang belum dipenuhi pada kegiatan program? 2). Tujuan pengembangan manakah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan? 3). Tujuan mana yang paling mudah untuk dicapai? (Arikunto, 2016: 46).

Berdasarkan pengertian di atas, ada dua point penting yang terdapat pada evaluasi konteks, yakni tentang kebutuhan dan tujuan yang mendasari mengapa evaluasi harus dilakukan. Pada faktor kebutuhan berangkat dari masalah yang terjadi di dalam lingkungan. Sehingga tujuan program berdasarkan permasalahan yang terjadi. Evaluasi pada konteks program paket C di kampung Tumbit Dayak melihat kebutuhan program berdasarkan masalah masyarakat Tumbit Dayak, latar belakang masyarakat Tumbit Dayak dan lingkungan yang mempengaruhi. Tujuan program tentu sesuai dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat Tumbit Dayak untuk memperoleh ijazah paket C dan mengalami perubahan pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tujuan program paket C pada wilayah pendidikan.

b. Evaluasi Input

Evaluasi Input menurut Stufflebeam (1983: 130) *Orientasi utama dari evaluasi input adalah untuk membantu mereseapkan suatu program yang dapat digunakan untuk membawa perubahan yang diperlukan.* Lalu secara lanjut Stufflebeam (1983: 130) mengatakan bahwa evaluasi

input, *harus mencari lingkungan klien tentang hambatan, kendala, dan sumber daya yang berpotensi tersedia yang perlu diperhitungkan dalam proses pengaktifan program*. Penjelasan stufflebeam mengarahkan pada point evaluasi input tentang pentingnya Perencanaan dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang tersedia pada program. Evaluasi input dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sumber daya bahan, alat, manusia dan biaya, untuk melaksanakan program yang telah dipilih (Endang, 2011: 129). Sedangkan Stufflebeam & Shinkfield dalam Guili et al. (2011: 64) memberikan pernyataan bahwa:

Evaluasi input membantu menentukan proyek untuk memenuhi kebutuhan yang akan diidentifikasi. Pertanyaannya, "Bagaimana seharusnya itu dilakukan?" dan mengidentifikasi desain prosedural dan strategi pendidikan yang kemungkinan besar akan mencapai hasil yang diinginkan. Akibatnya, orientasi utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan menilai kemampuan sistem saat ini, untuk mencari dan memeriksa secara kritis pendekatan yang berpotensi relevan, dan untuk merekomendasikan strategi proyek alternatif. Hasil dari langkah evaluasi input adalah proyek yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi. Keberhasilan proyek pembelajaran memerlukan rencana proyek yang baik yang, jika diimplementasikan dengan benar, akan menguntungkan baik penyedia layanan (siswa) dan penerima layanan (anggota masyarakat). Metode yang digunakan untuk melaksanakan evaluasi input meliputi inventarisasi dan analisis sumber daya manusia dan material yang tersedia, anggaran dan jadwal yang diusulkan, dan strategi solusi yang direkomendasikan dan desain prosedural.

Evaluasi Input yang dilakukan pada program paket C kampung Tumbit Dayak berdasarkan teori di atas, mengarah kepada perencanaan dengan melihat sumber daya pendukung pada program paket C, seperti: Silabus, RPP, Kurikulum, Tutor, Anggaran, Peserta didik, Sarana

Prasarana, dan Relasi. Sumber daya pendukung kemudian akan dinilai apakah memberikan dan mencapai hasil program yang diinginkan.

c. Evaluasi Proses

Menurut Stufflebeam (1983: 132) *Evaluasi proses adalah pemeriksaan berkelanjutan terhadap implementasi rencana. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik kepada manajer dan staf tentang sejauh mana kegiatan program sesuai jadwal, dilaksanakan sesuai rencana, dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien.* Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen yang perlu diperbaiki (Eko et al, 2017: 178). Lalu Stufflebeam & Shinkfield dalam Guili et al (2011: 65) menambahkan bahwa:

Evaluasi proses memonitor proses implementasi proyek. Ia bertanya, "Apakah ini sedang dilakukan?" Dan memberikan pemeriksaan berkelanjutan pada proses implementasi proyek. Tujuan penting dari evaluasi proses termasuk mendokumentasikan proses dan memberikan umpan balik mengenai (a) sejauh mana kegiatan yang direncanakan dilakukan dan (b) apakah penyesuaian atau revisi rencana diperlukan. Tujuan tambahan dari proses evaluasi adalah untuk menilai sejauh mana peserta menerima dan menjalankan peran mereka.

Berdasarkan teori dan pendapat di atas, maka evaluasi proses pada program paket C yang dilakukan di Kampung Tumbit Dayak adalah dengan melihat, apakah penyelenggara telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Apakah sumber daya pendukung RPP sudah diimplementasikan sesuai dengan peraturan

dari pemerintah, dan pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Dan apakah sumber daya pendukung (Input) bisa efisien.

d. Evaluasi Produk

Menurut Stufflebeam (1983: 134) *Tujuan dari evaluasi produk adalah untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai pencapaian suatu program.* Selain itu, menurut Stufflebeam *evaluasi produk harus melihat efek program secara luas, termasuk efek yang dimaksudkan dan tidak diinginkan serta hasil positif dan negatif.* Evaluasi produk adalah mengukur dan menginterpretasi pencapaian program selama pelaksanaan program dan pada akhir program (Sudjana, 2006: 56). Sedangkan Menurut Farida (2000: 14) evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun yang dilakukan setelah program itu berjalan. Menunjukkan pada perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Lalu evaluasi produk menurut Stufflebeam & Shinkfield dalam Guili et al (2011: 65) adalah:

Evaluasi produk mengidentifikasi dan menilai hasil proyek. Ia bertanya, "Apakah proyek berhasil?" Dan mirip dengan evaluasi hasil. Tujuan dari evaluasi produk adalah untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai hasil suatu proyek dengan menilai jasa, nilai, signifikansi, dan kejujuran mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan sejauh mana kebutuhan semua peserta dipenuhi.

Beberapa keputusan pada evaluasi model C.I.P.P menurut Sukardi (2012: 63) secara garis besar melayani empat macam keputusan:

1). Keputusan perancangan yang mempengaruhi pemilihan pernyataan umum dan objektif tertentu, 2). Penubuhan atau penstrukturan keputusan, yang melibatkan aktivitas memastikan strategi dan reka bentuk proses yang optimum untuk mencapai objektif yang diperoleh daripada keputusan merancang, 3). Keputusan pelaksanaan, dalam keputusan ini para penilai meminta kemudahan untuk menghasilkan dan meningkatkan pengambilan keputusan atau pelaksanaan, rencana, kaedah dan strategi yang akan dipilih, 4). Keputusan berbasikal yang menentukan, jika program diteruskan, dilanjutkan disesuaikan, dan/atau akan ditolak sepenuhnya berdasarkan kriteria yang sudah ada.

Berdasarkan pendapat dan teori di atas, maka evaluasi produk pada program Paket C yang dilakukan di kampung Tumbit Dayak adalah dengan melihat, apakah rencana dan tujuan awal sudah tercapai. Lalu dampak apa yang diberikan dari hasil program Paket C. apakah memberikan dampak yang positif atau negatif.

7) Discrepancy Model

Model ini dikembangkan oleh malcom provus, evaluasi ini menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen. Karena setiap komponen memiliki potensi terjadinya kesenjangan. Sering terjadi hal-hal yang tidak diprediksi sebelumnya. Sehingga hal itu perlu diperhatikan, karena kesenjangan juga berpotensi merusak program. Menurut Arikunto (2010: 48) evaluator menggambarkan ketimpangan antara standar kinerja yang ditetapkan dengan kinerja riil yang sudah dilaksanakan. Pada proses penyelenggaraan evaluasi ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam model evaluasi kesenjangan menurut Wirawan (2011: 106) adalah:

1). Merancang penilaian menggunakan model percanggahan, Menentukan pemberi pernyataan yang diperlukan untuk membandingkan pelaksanaan sebenar dengan standard yang menentukan prestasi objek penilaian. 2) Menangkap prestasi objek penilaian yang merangkumi pelaksanaan program, hasil kuantitatif dan kualitatif, 3) Mengenal pasti ketidakseimbangan antara standard pelaksanaan dengan keputusan pelaksanaan objek penilaian sebenar dan menentukan nisbah ketidaksamaan, 4) Menentukan penyebab ketidaksetaraan antara papaian dan prestasi penilaian objek, 5) Menghapuskan ketidaksetaraan dengan membuat perubahan pada pelaksanaan objek penilaian.

Sedangkan menurut (Provus dalam Wirawan, 2012: 132) Descrrepancy

Model meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1). Reka bentuk adalah satu peringkat aktiviti untuk merumuskan objektif, proses, objektif dan peruntukan sumber dalam menjalankan aktiviti untuk mencapai matlamat yang dinyatakan, 2). Pemasangan adalah reka bentuk yang digunakan sebagai standard untuk mempertimbangkan langkah-langkah operasi program ini, 3). Proses ini merupakan aktiviti penilaian yang berpusat pada usaha untuk mendapatkan data tentang kemajuan program, untuk menentukan apakah program tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan, 4). Produk ini merupakan penilaian untuk menentukan sama ada objektif program telah dicapai. 5). Analisis anggaran dan faedah, iaitu menganalisis keputusan yang diperoleh berbanding anggaran yang ditanggung.

Secara umum tahapan di atas menjelaskan bahwa perlu perencanaan untuk merumuskan tujuan yang ditetapkan dengan melihat dan menganalisis ketimpangan yang terjadi guna melakukan perbaikan terhadap program.

2. Paket C

a. Pengertian paket C

Program Paket C dalam buku terbitan Direktorat Kesetaraan Program Paket C (2006: 03) adalah program pendidikan menengah pada jalur nonformal setara SMA/MA bagi siapa saja yang terkendala pada pendidikan formal atau berminat dan memilih Pendidikan Kesetaraan untuk ketuntasan

pendidikan menengah. Paket C merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal. Berbagai macam kendala yang menyebabkan individu atau masyarakat tidak dapat melanjutkan pendidikan atau memilih untuk berkiprah di dunia kerja menjadi urgensi mengapa program paket C perlu diselenggarakan.

b. Kebutuhan paket C

Paket C sebagai program pendidikan nonformal setara SMA diselenggarakan atas perhitungan kebutuhan masyarakat yang sudah mendesak. Untuk mengetahui faktor kebutuhan paket C, maka perlu dilakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Analisis kebutuhan (need assessment) adalah proses menentukan prioritas kebutuhan pendidikan (John McNeil; dalam Sanjaya, 2008). Untuk menentukan lebih dalam tentang analisis kebutuhan paket C sebagai program yang bersifat pembelajaran, maka perlu dilakukan analisis kebutuhan tentang pembelajaran. Analisis kebutuhan pembelajaran (Morison; dalam Warsita, 2011) adalah:

- a). Kenali pasti keperluan yang berkaitan dengan tugas atau tugas semasa, iaitu masalah yang mempengaruhi hasil pembelajaran, b).
- Kenal pasti keperluan mendesak berkaitan dengan kewangan, keselamatan atau isu lain yang mengganggu kerja atau persekitaran pendidikan, c).
- Membentangkan skala keutamaan untuk memilih tindakan yang betul dalam mengatasi masalah pembelajaran, d).
- Menyediakan data asas untuk menganalisis keberkesanan aktiviti pembelajaran.

Program paket C sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah ketika masyarakat meminta program paket C kepada lembaga/instansi karena keperluan yang sudah mendesak, untuk menentukan skala prioritas penyelenggaraan program. Program perlu memperhatikan latar belakang

peserta didik sehingga sesuai dengan konteks program. Pengaruh potensi alam juga dapat mempengaruhi kebutuhan peserta didik terkait bidang pekerjaan yang digeluti, dimana program dapat saling berkaitan.

c. Tujuan Paket C

Program paket C sebagai program pendidikan nonformal memiliki tujuan penting untuk masyarakat. Pada Juklak Program Pendidikan Kesetaraan (2006: 02) program paket C diselenggarakan dengan dua tujuan yakni:

a). Tujuan umum: untuk menyediakan peluang terluas untuk pembelajaran untuk pelajar yang kurang maju untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka supaya mereka mempunyai kemahiran sekolah tinggi yang sama dan dapat meningkatkan pendidikan mereka ke tahap yang lebih tinggi. b). Objektif khusus ialah: (1). meningkatkan pengetahuan para pelajar untuk mengembangkan diri seiring dengan perkembangan sains, teknologi dan dunia kerja, (2) meningkatkan kemampuan sikap dan tingkah laku siswa sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat dalam melakukan hubungan timbal balik dengan persekitaran sosial, ekonomi dan alamiah, (3) meningkatkan pengetahuan kemahiran dan kebolehan pelajar untuk bekerja, perniagaan bebas, dan memberi peluang kepada mereka yang memenuhi syarat dan syarat untuk meneruskan pendidikan mereka pada tahap yang lebih tinggi.

Tujuan pendidikan kesetaraan paket C adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan jalan kepada masyarakat agar memperoleh kesempatan yang sama dengan masyarakat lain yang sudah memiliki ijazah SMA/ sederajat untuk dapat digunakan sebagai bekal ketika melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu tujuan program paket C terutama pada hasil pembelajaran adalah terjadinya peningkatan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik karena peserta didik berinteraksi

secara langsung dengan lingkungan sosial/kerjanya. Perubahan peserta didik pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap menjadi indikator keberhasilan program paket C.

d. Standar proses pendidikan kesetaraan paket C

Program paket C sebagai salahsatu alternatif pemecahan masalah pendidikan yang dihadapi masyarakat. Disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia bahwa pada pelaksanaannya harus memperhatikan standar yang sudah ditetapkan. Terdapat beberapa standar yang menjadi pedoman, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang standar proses pendidikan kesetaraan program paket program paket C meliputi:

I. Perencanaan Proses Pembelajaran

a) Silabus dan RPP

Perancangan proses pembelajaran merangkumi silabus pelajaran dan pembelajaran pelan pelaksanaan (RPP) yang merangkumi identitas subjek, standard kompetensi (SK), kecakapan dasar (KD), petunjuk pencapaian kompetensi, objektif pembelajaran, bahan pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, aktivitas pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan sumber pembelajaran. Merancang proses pembelajaran untuk pendidikan kesamarataan Program Program Paket C menganggap kepelbagaian ciri-ciri pelajar.

Silabus dan RPP dikembangkan dengan merujuk kepada pencapaian beban belajar yang menggunakan sistem modular dengan

penekanan terhadap pembelajaran bebas, kesempurnaan pembelajaran, dan kemajuan yang mampan. Perancangan proses pembelajaran merujuk kepada satuan kredit kompetensi (SKK) yang merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi hasil pembelajaran pelajar dalam menguasai subjek.

b) Tutor

Tutor adalah tenaga pendidik/guru yang menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik sesuai dengan bidang keilmuannya. Tutor memiliki tanggung jawab penuh pada proses pembelajaran peserta didik untuk mencapai perubahan sampai pada hasil yang diinginkan. Menurut Pedoman Standar Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Kesetaraan Tahun 2006, standard kompetensi tutor pendidikan kesetaraan termasuk empat komponen, yaitu: (1) kecakapan pedagogis dan/ andragogi, (2) kecakapan keperibadian, (3) kecakapan sosial, dan (4) kecakapan profesional.

Tutor harus memiliki kemampuan professional dengan pengalaman mengajar yang sudah lama, memiliki ijazah/sertifikat untuk membuktikan keahliannya di bidang tertentu, memiliki sikap disiplin serta ramah kepada peserta didik yang memiliki karakter beragam. Tutor professional harus memiliki kemampuan merancang program melalui silabus dan RPP. Tutor khususnya pendidikan nonformal harus pula memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan karakter masyarakat

setempat, wilayah pendidikan nonformal yang begitu akrab dengan lingkungan sosial memaksa tutor harus memiliki kemampuan sosial yang tinggi.

c) Peserta didik

Peserta didik adalah masyarakat yang mengikuti program paket C dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan lembaga penyelenggara program. Ada berbagai macam karakter peserta didik yang perlu diamati. Peserta didik dengan ciri dalaman dan luaran mereka, ciri dalaman adalah sifat fizikal, psikologi, dan fungsian pelajar. Atribut fizikal seperti: Umur, ketinggian, berat, dan lima keadaan deria. Atribut psikik: motivasi belajar, keperluan, jangkaan, keinginan, minat, matlamat dan tempoh kritikal. Ciri-ciri fungsional termasuk kerja, pendidikan, kesihatan, dan status sosio-ekonomi Ciri-ciri luar yang berkaitan dengan kerja, tabiat, dan kemudahan pembelajaran yang terdapat di dalam komuniti dan di kawasan tersebut (Nur, 2015: 214).

Peserta didik program paket C adalah masyarakat lokal yang memang membutuhkan program karena tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Peserta didik yang mengikuti program paket C adalah seluruh lapisan masyarakat baik laki-laki, perempuan, remaja, dewasa, bahkan tanpa memandang suku dan agama apapun. Selama peserta didik terdaftar dan memang menetap di Kampung Tumbit Dayak dan telah memenuhi syarat yang sudah diajukan oleh lembaga maka diperbolehkan ikut.

d) Kurikulum

Kurikulum sebagai perangkat program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan berisi rancangan pelajaran yang diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Afzaal (2011: 264) menyatakan bahwa karakteristik kurikulum yang baik adalah:

1) Berikut ini adalah karakteristik dari Kurikulum yang baik; 2) Pengembangan Pemahaman Sosial: Promosi Pengembangan Pribadi Maksimal: 3) Promosi Kesenambungan Pengalaman: 4) Penyediaan Tujuan Pendidikan: 5) Pemeliharaan Keseimbangan di antara Semua Tujuan: Pemanfaatan Pengalaman Belajar yang Efektif dan Sumber Daya yang Dibutuhkan

Permendikbud No.81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum, evaluasi kurikulum mencakup: (1). Evaluasi reflektif dilakukan dalam suatu proses diskusi intensif dalam kelompok pengembang kurikulum (Tim pengarah dan Tim teknis) dan Tim narasumber secara internal. (2). Evaluasi dokumen kurikulum, (3). Evaluasi implementasi kurikulum pada tingkat daerah mencakup kajian kebijakan dalam penyiapan dan distribusi dokumen muatan lokal, penyiapan dan peningkatan kemampuan sumber daya yang diperlukan, dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal serta keterlaksanaannya pada tingkat satuan pendidikan.

Evaluasi hasil implementasi kurikulum merupakan evaluasi ketercapaian standar kompetensi lulusan pada setiap peserta didik pada satuan pendidikan. Penentuan kurikulum adalah dengan melihat kemampuan dan keadaan setiap jenjang pendidikan dalam

penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum paket C perlu memperhatikan kebutuhan lapangan kerja.

e) Anggaran

Anggaran adalah rencana keuangan yang disalurkan pada waktu tertentu. Menurut Nurhattati (2014: 45) biaya pendidikan tidak hanya menganalisis sumber anggaran/dana, tapi juga menyangkut penggunaan Anggaran secara efisien dalam pencapaian tujuan pendidikan. Pengelolaan Anggaran mencakup tiga aspek: 1). penerimaan atau sumber dana, 2). pengeluaran atau alokasi, (3). pertanggung jawaban dalam bentuk pembukuan (Nurhattati Fuad, 2014: 46). Perlunya analisis mendalam mengenai anggaran yang menjadi salahsatu kunci keberhasilan program. Belfield (2018: 05) menyatakan bahwa:

Biaya. Analisis biaya yang dilakukan dalam setiap laporan peraturan dikodekan ke dalam empat tingkatan. Level-level ini mewakili analisis biaya yang semakin luas. Pertama, analisis biaya diklasifikasikan sebagai "dinyatakan" jika ada referensi dalam laporan untuk penggunaan sumber daya selain alokasi anggaran dan jika ada beberapa deskripsi tentang bagaimana sumber daya yang diperlukan sesuai dengan kebijakan yang sedang dilaksanakan. Kedua, analisis biaya diklasifikasikan sebagai "bahan-bahan" jika ada daftar bahan-bahan sumber daya yang dibutuhkan atau uraian mereka dengan detail. Ketiga, analisis biaya diberi kode sebagai "agensi" jika ada diskusi tentang biaya yang dikeluarkan oleh agensi lain. Akhirnya, analisis biaya dikodekan sebagai "nilai dolar yang dihitung" jika ada nilai dolar yang ditetapkan untuk biaya. Kode terakhir ini adalah jenis analisis biaya yang paling luas (meskipun kami mencatat bahwa peraturan dapat dan memang menghitung biaya tanpa mempertimbangkan bahan atau biaya untuk agen lain).

Adanya anggaran awal baik dari pihak pemerintah maupun swasta dapat mempermudah kegiatan program paket C. anggaran yang baik

adalah ketika sesuai dengan kebutuhan, dan dikelola sesuai kebutuhan dan transparan agar dapat dipertanggungjawabkan kemudian.

f) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan semua peralatan dan perlengkapan serta fasilitas yang secara langsung maupun tidak langsung dipergunakan untuk menunjang jalannya proses pendidikan (Nurhattati, 2014: 43). Wujud kemudahan dan infrastruktur bukan saja menyokong proses pendidikan, tetapi juga perlu menyediakan persekitaran pembelajaran yang selamat, merangsang dan menyenangkan supaya pelajar menikmati pembelajaran dan pencapaian yang tinggi (Nurhattati, 2014: 43). Clarke dan Stephen di Omae (2017: 98) menerangkan bahwa pendidikan berkualitas berguna apabila terdapat kuantitas dan kualitas infrastruktur fizikal yang mencukupi; dan bangunan sekolah yang tidak menarik, bilik darjah yang penuh sesak, permainan kanak-kanak yang tidak ada dan persekitaran yang tidak mempunyai kecantikan estetik dapat menyumbang kepada prestasi akademik yang lemah.

Tersedianya sarana dan prasarana pada program paket C sangat mendukung kegiatan. Seperti adanya media belajar yang mendukung dan media penunjang yang memberikan rasa nyaman sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara khidmat. Perawatan sarana dan prasarana juga penting untuk keberlanjutan program.

g) Relasi

Relasi adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah tertentu, yang memiliki hubungan interaksi satusama lain yang menjadikan kelompok itu saling mengenal satu sama lain dalam lingkungan sebuah kelompok manusia tersebut (Hillery, 2010). Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola komunikasi dalam hubungan interpersonal (Jalaluddin, 1998: 121):

1. Kepercayaan: Percayalah untuk menentukan efektivitas komunikasi dan dapat meningkatkan jumlah komunikasi interpersonal yang terbentuk,
2. Sikap Mendukung: Sikap yang mendukung adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Komunikasi pertahanan dapat terjadi karena faktor personal (ketakutan, kebimbangan, harga diri rendah, pengalaman defensif, dll.) Atau faktor situasional.
3. Sikap terbuka: Sikap terbuka sangat berpengaruh dalam memupuk komunikasi interpersonal yang berkesan.

Agar komunikasi interpersonal yang kita lakukan melahirkan hubungan yang efektif maka dogmatisme (sikap tertutup harus digantikan dengan sikap terbuka. Dukungan dan kepercayaan dari relasi dapat menentukan program sesuai dengan harapan bersama. Menurut Research Brief (2015: 5-6) ada empat strategi kemitraan:

- 1) *Bangunan kerjasama memperluas dua jenis dukungan program tenaga kerja: sosial (mis., Melobi, melibatkan pesaing potensial) dan organisasi (mis., Peralatan, ruang);*
- 2) *Proses komunikasi menetapkan visi, nilai-nilai, dan prioritas untuk pendekatan kemitraan terhadap perubahan sistemik dalam persiapan tenaga kerja;*
- 3) *Pengembangan kredibilitas mencakup memiliki rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjukkan efektivitas program tenaga kerja terhadap audiens eksternal;*
- 4) *Persiapan kontinjensi memastikan program tenaga kerja memiliki dukungan sosial dan sumber daya organisasi untuk menghadapi perubahan di pasar tenaga kerja dan peluang pendanaan yang ditawarkan oleh pemerintah, industri, pendidikan, dan pemain lain*

Strategi kemitraan sebagai kunci untuk mempertahankan hubungan kerjasama dalam rangka mendapatkan peluang pendanaan menghadapi industrilisasi, serta dukungan sosial yang dapat mempertahankan eksistensi lembaga dan mengadakan program dengan skala yang lebih besar.

2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program paket C, maka program paket C:

a. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi lembaga/instansi ketika program paket C telah dilaksanakan, yakni:

1) Rombongan belajar:

Jumlah maksimal peserta didik rombongan belajar Program Paket C setara SMA / MA: 30 peserta didik. Jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya satuan pendidikan,

2) Penyelenggara pembelajaran:

Penyelenggara berkewajiban menyediakan: a). Pendidik sesuai dengan resolusi mata pelajaran, b). Jadwal tutorial minimal 2 hari per minggu, c). Sarana dan prasarana pembelajaran.

3) Buku teks pelajaran, modul dan sumber belajar lain:

a) Buku teks pelajaran dan modul yang dipilih oleh pendidik dan satuan pendidikan untuk digunakan sebagai panduan dan sumber belajar; b) Buku teks pelajaran dan modul untuk peserta didik adalah 1: 1 per mata pelajaran; c) Pendidik menggunakan buku penunjang pelajaran berupa buku panduan pendidik, buku referensi, buku pengayaan, dan sumber belajar lain yang relevan; d). Pendidik membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan.

b. Implementasi RPP

Implementasi RPP mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket C. bahwa Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Implementasi RPP dikatakan baik ketika pelaksanaan pembelajaran mengacu pada rancangan RPP.

c. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan aktivitas ditentukan oleh faktor aktual semasa proses pembelajaran. Faktor-faktor ini termasuk: Tujuan pendidikan, tenaga pengajaran (minat, sikap, pandangan, gaya pengajaran, kestabilan emosi, dll.), Kandungan bahan pelajaran, bahan pengajaran, organisasi bahan, metodologi yang dibangunkan, pendekatan yang digunakan, diadakan,

bimbingan dan kaunseling yang disediakan, kemudahan pendidikan dan infrastruktur, sistem pentadbiran, keadaan pelajar, dan sistem penilaian, dan sistem penilaian yang digunakan (Bambang, 2016: 21).

Profesionalitas tutor sebagai tenaga pendidik memang urgen dalam menentukan keberhasilan program pembelajaran (Bambang, 2016: 21). Untuk mencapai standar yang diinginkan, tutor memiliki peranan yang penting, karena bertugas sebagai pembuat formula, berupa rencana atau metode pembelajaran yang tepat sasaran. Perlu diketahui bahwa kaedah pembelajaran terdiri daripada kaedah untuk pembelajaran individu dengan teknik perantisan, modal, melakukannya sendiri, dan tutorial: kaedah pembelajaran kumpulan seperti kuliah, ceramah, perbincangan dan tugas kumpulan (Nur, 2015: 215).

Pada Buku Pedoman Pelaksanaan Program Paket C tahun 2006, metode pembelajaran menyesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik sesuai indikator dan kompetensi yang ingin dicapai pada mata pelajaran tertentu. Metode pembelajaran terdiri daripada: kaedah koperasi, kaedah interaktif, kaedah eksperimen, tutorial, perbincangan, tugas, amalan, pembelajaran bebas, demonstrasi, pemerhatian, simulasi dan kajian kes. Dalam proses pembelajaran penilaian adalah interaksi pendidikan antara pelajar dan pendidik. Proses ini melibatkan pembelajaran, bimbingan dan atau latihan (Nur, 2015: 215).

1) Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian dilakukan oleh pendidik terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis atau lisan, dan nontes dalam bentuk pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri.

Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran. Penilaian hasil belajar untuk memperoleh ijazah Program Paket C dilakukan setelah peserta didik mencapai SKK yang disyaratkan. Penilaian pada konteks pemberdayaan masyarakat tidak hanya sampai pada hasil pembelajaran, ada beberapa Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, hal-hal sebagai berikut:

1). Mengurangi jumlah orang miskin, 2). Pembangunan usaha untuk meningkatkan pendapatan yang dibuat oleh orang miskin dengan menggunakan sumber yang ada, 3). Meningkatkan kesadaran orang banyak terhadap usaha untuk meningkatkan kebaikan kepada keluarga miskin di lingkungan mereka, 4). Peningkatan kemerdekaan komunitas yang dicirikan oleh perkembangan ahli dan komunitas yang produktif, semakin kuat modal kumpulan, semakin rapuh sistem administrasi komunitas, dan interaksi yang lebih luas dari kumpulan dengan kelompok lain dalam masyarakat, 5). Kapasitas masyarakat yang semakin meningkat dan pengalihan pendapatan yang seimbang yang dicirikan oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi keperluan dasar dan keperluan sosial (Gunawan, 1999: 138-139).

Indikator di atas mengacu pada hasil program. Lebih jauh program berdampak pada peningkatan peserta didik, pada pendapatan, kesejahteraan

hidup, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan keluarga.

4. Pengawasan Proses Pembelajaran

a. Pemantauan

1). Memantau proses pembelajaran dijalankan pada perancangan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar; 2). Pemantauan dilakukan dengan perbincangan kumpulan fokus, pemerhatian, rakaman, rakaman, wawancara, dan dokumentasi; 3). Aktiviti pemantauan dilakukan oleh penganjur program, pemeriksa, dan / atau Pejabat Daerah / Kota yang bertanggungjawab untuk pendidikan.

b. Pengawasan

1). Pengawasan proses pembelajaran dijalankan pada perancangan, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar. 2). Pengawasan pembelajaran dilakukan dengan memberikan contoh, diskusi, latihan, dan konsultasi. 3). Aktiviti penyeliaan dijalankan oleh penganjur program, penyelia dan / atau Pejabat Daerah / Kota yang bertanggung jawab untuk pendidikan.

5. Evaluasi

a. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan mutu pembelajaran secara keseluruhan, termasuk peringkat perancangan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.

b. Evaluasi proses pembelajaran dijalankan oleh: (1). bandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik dengan proses kesetaraan

pendidikan standard, (2). mengenal pasti prestasi pendidik dalam proses pembelajaran selaras dengan kecekapan pelajar.

c. Evaluasi proses pembelajaran memberi tumpuan kepada prestasi keseluruhan pendidik dalam proses pembelajaran. 1). Aktiviti penilaian dijalankan oleh penganjur program, pengawas, dan / atau Pejabat Daerah / Kota yang bertanggung jawab untuk pendidikan.

6. Pelaporan

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan.

7. Tindak lanjut

- a. Penguatan dan penghargaan diberikan kepada pendidik yang telah memenuhi standar.
- b. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada pendidik yang belum memenuhi standar.
- c. Pendidik diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut.

3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

a. Pengertian PKBM

PKBM merupakan tempat atau panti pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi pedesaan dan atau perkotaan untuk menggerakkan pembangunan dibidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya (Sudjana, 2004: 147). Sedangkan menurut Tohani (2009: 01) PKBM merupakan suatu tempat kegiatan pembelajaran masyarakat yang terfokus pada

pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan potensi masyarakat dalam mencapai kemajuan pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Lalu PKBM didefinisikan Suryono (2014: 12) memiliki potensi untuk menyelenggarakan seluruh layanan program pendidikan luar sekolah yang mencakup kegiatan-kegiatan nonformal dan informal. Sharma (2014: 97) menerangkan bahwa PKBM telah menawarkan beragam layanan pendidikan dari perawatan dan perkembangan anak usia dini, pendidikan dasar untuk semua anak, dan kedua kesempatan pendidikan dasar untuk remaja, untuk program keaksaraan dan pasca-keaksaraan, program pendidikan wanita, pengembangan keterampilan kejuruan, dan program yang menghasilkan pendapatan dan layanan informasi masyarakat.

UNESCO dalam Deli dan yasin (2017: 829) PKBM adalah lembaga pendidikan lokal di luar formal, dengan sistem pendidikan untuk desa atau daerah pedesaan, biasanya didirikan dan dikelola oleh penduduk lokal di Indonesia yang memberikan kesempatan untuk belajar sepanjang hayat yang berfokus pada literasi dan pendidikan dasar untuk pemberdayaan, pembangunan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup, terutama melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk memberantas kemiskinan.

Dari pendapat di atas dapat dimaknai bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat adalah suatu wadah dimana masyarakat berkumpul untuk memperoleh kebebasan memilih program pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka. PKBM menjadi fasilitas yang mempertemukan bakat, minat serta kebutuhan masyarakat untuk belajar guna menambah kapasitas agar mampu terlibat dalam pembangunan

masyarakat. PKBM sebagai tempat masyarakat untuk memperoleh pendidikan secara nonformal dan informal menjadi alternatif penyelarasan seluruh pendidikan di Indonesia.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 105 tentang PKBM, Ayat 1 menjelaskan bahwa PKBM dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk: 1). Memperoleh pengetahuan dan keterampilan; 2). memperoleh keterampilan kecakapan hidup; (3). mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; 4). mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri, dan 5) . melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Penyelenggaraan PKBM sebagai napak tilas pembangunan menjadi salah satu solusi paling efektif jika melihat masyarakat yang heterogen, mulai dari kebudayaan, agama, kehidupan sosial antara masyarakat desa, transisi dan kota, sehingga perlu cara-cara yang berbeda, namun secara umum penyelenggaraan PKBM adalah untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, khususnya pendidikan nonformal.

b. Tujuan PKBM

Tujuan pelembagaan PKBM adalah untuk menggali, menumbuhkan, mengembangkan, dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada dimasyarakat itu sendiri (Sihombing, 1999). UNESCO dalam Deli dan yasin (2017: 829) Secara khusus, tujuannya adalah untuk mendorong perkembangan manusia dengan memberikan pembelajaran seumur hidup peluang bagi semua orang di komunitas lokal, terutama bagi yang putus sekolah sistem pendidikan konvensional berdasarkan permintaan dari masyarakat. Fokus CLC tentang pemberdayaan,

perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup.

PKBM dapat menjadi jembatan dalam menghubungkan antara potensi yang sudah ada namun tidak disadari oleh masyarakat, atau masyarakat belum mengetahui cara untuk mengembangkannya. Pemenuhan kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat dapat memberikan efek positif. Kesadaran masyarakat untuk berubah juga menjadi tugas yang perlu diperhatikan oleh pengurus PKBM.

Proses pengembangan potensi masyarakat atas dasar kesadaran untuk mengubah masyarakat menjadi lebih mandiri merupakan prospek kemanusiaan. Pertemuan dengan intensitas tinggi tentu dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pengurus PKBM karena keterikatan dan rasa empati. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan PKBM dalam membangun potensi masyarakat, sesuai dengan tujuan PKBM sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

c. Fungsi PKBM

PKBM sebagai lembaga resmi yang telah diatur oleh pemerintah, diharapkan memiliki peran dan fungsinya ditengah masyarakat yang membutuhkannya. Menurut Tohani (2009: 03) PKBM berfungsi sebagai: 1) melakukan kegiatan pembelajaran, 2) melakukan koordinasi dala memanfaatkan potensi masyarakat, 3) menyajikan informasi, 4) ajang pertukaran informasi dan pengetahuan, dan 5) menjadi tempat untuk upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai tertentu bagi warga masyarakat yang

membutuhkannya. Sedangkan menurut Sihombing (1999) fungsi PKBM sebagai berikut:

- 1) Tempat pusaran berbagai potensi yang wujud dan berkembang dalam masyarakat, keberagaman masyarakat juga menunjukkan berbagai potensi, tetapi kadang kala orang tidak menyadari potensi ini, atau tidak tahu di mana untuk menyalurkan potensi itu, PKBM akan menjadi sebuah institusi yang mengarahkan atau menyedarkan masyarakat tentang berpotensi dimiliki.
- 2) Sebagai sumber informasi yang boleh dipercayai untuk orang yang memerlukan keterampilan fungsional, dengan menyediakan keterampilan fungsional, masyarakat dapat menggunakannya dengan cepat. PKBM adalah ruang masyarakat untuk memiliki keterampilan fungsional sesuai kebutuhan masyarakat.
- 3) Sebagai tempat untuk bertukar berbagai pengetahuan dan keterampilan fungsional di kalangan rakyat, semakin luas pengetahuan tentang pemenuhan keterampilan, semakin banyak pengetahuan masyarakat akan mengembangkan keterampilan fungsional mereka, maka masyarakat akan memiliki banyak alternatif untuk menerapkan keterampilan fungsional mereka.

d. Langkah-langkah penyusunan program PKBM

Ada beberapa langkah-langkah yang mesti diperhatikan ketika menyusun program paket C agar memiliki kematangan dan kesiapan, sehingga program sampai pada tujuan. Menurut Sihombing (1999) Langkah-langkah dalam penyusunan program PKBM dapat diikuti sebagai berikut:

- 1) Merancang aktivitas program, merancang sebagai penerangan program langkah-langkah program, aliran program dan reka bentuk program yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan dan jangkaan.
- 2) Tentukan dan menentukan berbagai sumber yang diperlukan, seperti sumber manusia, bahan dan keuangan, beberapa sumber akan mempengaruhi keberhasilan program ini supaya ia memerlukan pengiraan yang teliti, dengan melihat berbagai aspek seperti konteks program, input yang mempengaruhi program seperti tutor, pelajar, kemudahan dan infrastruktur, kurikulum, belanja dan pihak yang akan di ajak untuk bekerjasama.
- 3) Menyebarkan komunitas program dan tempat program, sosialisasi sebagai pengenalan untuk mendapatkan umpan balik secara langsung atau mendapat input dari masyarakat awam atau instansi yang tidak terjawab oleh anggaran penganjur program. Sehingga dapat dilihat kepentingan masyarakat dan pemerintah sebagai bahan untuk dipertimbangkan apakah program itu layak atau tidak layak.
- 4) Menerima warga belajar, apabila sosialisasi telah dijalankan, calon pelajar yang berminat untuk menyertai program ini boleh mendaftarkan diri

mereka untuk dimasukkan ke dalam data PKBM, dan administrator PKBM dapat melihat berbagai dan ciri-ciri komunitas pembelajaran.

- 5) Menemukan keperluan komunitas pembelajaran yang berkaitan dengan bahan yang dibangunkan dalam program, keperluan komunitas pembelajaran adalah penting untuk diketahui karena program yang diadakan sesuai dengan keperluan masyarakat yang sangat berguna, karena hasilnya dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat.
- 6) Mewujudkan keperluan bahan pembelajaran (program), berdasarkan keperluan masyarakat, bahan pembelajaran disusun untuk memenuhi keperluan masyarakat. Malah bahan pembelajaran boleh dikembangkan mengikut kemampuan komunitas pembelajaran.
- 7) Menetapkan tujuan dan objektifitas program, sasaran menjadi terbuka kepada masa yang ditetapkan, supaya jelas di mana akhir program diadakan, apabila sasaran dipenuhi dan objektifitas program dipenuhi, program dianggap berhasil.
- 8) Membangunkan kurikulum dan bahan pembelajaran, kurikulum sebagai reka bentuk dan peraturan yang dijalankan semasa pembelajaran. Proses pembelajaran dirancang dengan cara terperinci dalam kurikulum, supaya lembaga dan tutor dibiarkan merujuk kepada kurikulum dan bahan pembelajaran.

- 9) Menjalankan program, berdasarkan anjuran yang telah disediakan dengan berbagai pertimbangan, program dapat dijalankan, serta untuk melihat keefektifannya.
- 10) Menjalankan pemantauan dan penilaian program, pemantauan dijalankan untuk mengawasi proses pembelajaran supaya efektivitas dan hambatan yang dapat dikenal pasti, kemudian dinilai untuk melihat berbagai aspek yang menjadi bahan penilaian atau pertimbangan apakah program tersebut masih bisa dijalankan atau dihentikan.
- 11) Mengembangkan program berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian, penilaian program boleh digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan program yang lebih baik.

e. Karakteristik PKBM

Instansi/lembaga masyarakat tentu memiliki karakteristik yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik juga menjadi ciri khas yang memudahkan pengenalan. PKBM sebagai lembaga pendidikan nonformal tentu memiliki karakteristik tersendiri, karakteristik tersebut menurut (Sihombing, 1999) adalah sebagai berikut:

- 1) Tempat untuk belajar masyarakat, PKBM sebagai forum untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang orang tidak mempunyai peluang untuk mendapatkannya. PKBM menawarkan berbagai jenis

bidang pengetahuan dan keterampilan agar orang dapat memilih mengikuti kebutuhan mereka.

- 2) Tempat pertukaran pembelajaran, PKBM sebagai tempat untuk bertukar informasi (pengalaman), pengetahuan dan kecakapan di kalangan warga belajar, supaya warga belajar antara satu sama lain dapat saling melengkapi, mengajar dan memilih pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan komunitas.
- 3) Pusat pengetahuan dan informasi atau perpustakaan masyarakat, potensi masyarakat pasti akan berubah jika tidak ada rujukan atau kajian, sehingga PKBM menyediakan informasi pembelajaran, perpustakaan masyarakat dapat menambah wawasan kepada masyarakat untuk mengembangkan diri.
- 4) Sebagai pusat pertemuan untuk berbagai lapisan masyarakat, PKBM tidak memberikan sekatkan kepada masyarakat, selagi program merasa perlu dianjurkan supaya semua lapisan masyarakat dapat mengikutinya, baik kanak-kanak, remaja, dewasa, lelaki, wanita, dan bergantung pada jenis program yang dipilih, jadi keberagaman terasa di PKBM.
- 5) Pusat penyelidikan masyarakat (pusat penyelidikan masyarakat), khususnya dalam pembangunan pendidikan, informasi, data dan pengajaran nonformal, dapat digunakan sebagai bahan penyelidikan sehingga mereka dapat terus mengembangkan pendidikan non-formal ke arah yang lebih baik.

f. Faktor Keberhasilan PKBM

PKBM yang berhasil eksis dan konsisten dalam menyelenggarakan berbagai macam program tentu memiliki faktor-faktor penunjang yang menyebabkan demikian. Beberapa faktor penunjang keberhasilan pengembangan program PKBM meliputi (Sihombing dan Gutama, 2000):

- a). Kemampuan untuk mengenal pasti dan merekam keperluan masyarakat (warga belajar); b). Melayani keperluan dan kepentingan warga belajar dalam aktivitas yang berbeda-beda atau sepadan dengan keperluan dan kepentingan mereka; c). Menggerakkan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat; d). Membina hubungan dan kerjasama secara terbuka dengan berbagai institusi atau organisasi, sehingga PKBM dapat mengembangkan berbagai kegiatan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan setempat; e). Memantau kemajuan aktivitas dan kejayaan supaya ia menjadi dasar bagi pembangunan program masa depan; f). Merekam berbagai kelebihan dan kekurangan aktivitas yang dijalankan oleh PKBM.

Senada dengan pendapat di atas, bahwa kebutuhan masyarakat menjadi hal yang paling diprioritaskan dalam upaya pencapaian tujuan PKBM, penyelenggaraan program PKBM harus memperhatikan faktor kebutuhan agar program dapat berjalan secara kontekstual, dari segi potensi daerah juga menjadi bahan pertimbangan ketika ingin membuat suatu program, karena sumber daya menjadi potensi terbesar yang jika disinergikan akan menciptakan masyarakat yang berprogress.

Ketika program telah diselenggarakan maka para pengurus PKBM serta pihak-pihak terkait tidak boleh lepas tangan, melihat pentingnya pengawasan agar tetap berjalan pada koridornya dan tidak melenceng jauh dari tujuan awal. Untuk mengetahui keberhasilan PKBM maka sangat di perlukan evaluasi terkait keberhasilan program sehingga di peroleh data terkait kelanjutan dan

pengembangan program. Jika melihat ruang lingkup PKBM maka kita harus mengetahui jenis-jenis program yang ditawarkan.

g. Program PKBM

Ada beberapa program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jenis program PKBM menjadi alternatif untuk membantu masyarakat dibidang pendidikan nonformal. Program PKBM (Depdiknas, 2006) terdiri atas:

- 1) Keaksaraan Fungsional, program ini diadakan untuk orang buta huruf, orang yang tidak dapat membaca, menulis dan berhitung.
- 2) Program Paket A setara dengan sekolah dasar, Program Paket B setara dengan sekolah menengah pertama, Program Paket C setara dengan sekolah menengah atas, program paket kesetaraan diadakan untuk orang yang tidak menerima pendidikan formal di peringkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas
- 3) Kelompok Belajar Usaha, program ini menjadi tempat pembelajaran bagi orang-orang yang ingin membangunkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang perniagaan, di mana orang berkongsi maklumat dan membantu antara satu sama lain untuk mengembangkan perniagaan mereka.
- 4) Magang, program Magang adalah latihan atau pengenalan kepada bidang kerja secara praktikal, di mana masyarakat langsung merasakan pekerjaan

tertentu, sebagai pertimbangan untuk lembaga atau institansi untuk mempekerjakan masyarakat.

- 5) Pendidikan Kesetaraan Gender, program ini merupakan bentuk empati bagi wanita untuk dapat mengembangkan kerjanya sehingga mereka dapat bekerja seperti lelaki, tentu saja dengan bidang yang diinginkan. Jadi wanita juga mendapat pendapatan untuk memenuhi keperluan.
- 6) Kursus dan Latihan Keterampilan, orang yang merasa mereka kurang pengetahuan dan keterampilan dapat mengambil kursus dan latihan, dengan berbagai bidang yang dikehendaki sesuai dengan kepentingan masyarakat.
- 7) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan program lain yang diperlukan oleh masyarakat. Program PAUD adalah program untuk membantu kanak-kanak menjadi lebih baik, kreatif, dan aktif. Jadi anak-anak mempunyai dasar yang kuat apabila mereka remaja.

4. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan dari pihak luar untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri (Totok, 2013: 100). Adanya suatu usaha untuk menghindari ketergantungan dengan kemampuan sendiri merupakan satu aspek penting guna mewujudkan kemandirian. Untuk memenuhi tujuan tersebut

maka diperlukan suatu kegiatan pengembangan kemampuan.

Menurut Soetomo (2015: 88) unsur utama dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Sejalan dengan upaya untuk memberdayakan masyarakat, maka diperlukan suatu upaya peningkatan kapasitas bagi masyarakat, berupa penambahan atau pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta sikap agar masyarakat memiliki pertimbangan-pertimbangan luas dalam menentukan sebuah keputusan.

b. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat tidak serta merta dilakukan secara serampangan. Perlu prinsip-prinsip yang di jadikan sebagai acuan dalam menyelenggarakan program. Menurut Ginanjar (2003: 11) dalam pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- 1). Mewujudkan atmosfer atau iklim yang mendukung potensi masyarakat yang mendukung pelaksanaan program ini harus menghindari andaian yang tidak sah, atau hanya memproyeksikan, tanpa melalui analisa tentang potensi potensi yang dapat digunakan, semakin banyak potensi yang dibangkitkan, semakin tinggi minat masyarakat untuk terlibat secara aktif pada suatu program yang akan diadakan; 2). Memperkuat potensi atau kuasa yang dimiliki oleh masyarakat (pemberdayaan) apabila potensi yang dapat dilihat di permukaan, kemudian adalah untuk membuat rancangan program yang dapat memberikan penguatan dan pengembangan potensi itu, melalui institusi atau organisasi yang harmoni dengan tujuan masyarakat; 3). Pemberdayaan juga mengandung makna perlindungan, integritas menjadi sangat penting dalam kehidupan sosial untuk menghindari tindakan yang dapat membahayakan masyarakat. Menepikan kepentingan ekonomi atau politik, bergerak berdasarkan kesadaran moral untuk membantu orang lain, memberi mereka kekuatan untuk dapat melindungi diri mereka dari ancaman yang menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan.

Prinsip menuntun pada hal substansial, sehingga memiliki makna yang mendasar. Totok & Poerwoko (2017: 105) menambahkan prinsip-prinsip dalam memberdayakan masyarakat adalah:

1) Kerja: melibatkan masyarakat untuk melaksanakan sesuatu, karena melalui kerja-kerja masyarakat mengalami proses pembelajaran dan akan diingat dengan jangka waktu yang panjang; 2). Akibatnya: mesti mempunyai pengaruh yang baik dan berfaedah kepada masyarakat; 3). Persatuan: setiap aktivitas pemberdayaan masyarakat mesti dikaitkan dengan aktivitas lain, karena, setiap orang cenderung mengaitkan kegiatannya dengan kegiatan lain.

Prinsip keterlibatan tentu menjadi tolak ukur dalam melihat sejauh mana animo masyarakat terhadap program yang diselenggarakan, apakah masyarakat merasa punya andil dan tanggung jawab untuk mengubah kehidupannya dan juga lingkungannya. Jika masyarakat ikut terlibat, maka hal ini juga akan berpengaruh terhadap kemanfaatan suatu program. Mengikut sertakan masyarakat dalam setiap tahapan berarti memberikan mereka kepercayaan penuh. Sehingga proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara khidmat. Partisipasi masyarakat memudahkan proses pemberdayaan, masyarakat memiliki ketertarikan untuk mengikuti program yang diberikan. Selain itu, harus ada unsur kemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari penyelenggaraan program.

Kemanfaatan merupakan salahsatu daya tarik masyarakat lain agar mau turut berpartisipasi. Program yang di berikan haruslah kontekstual dengan kondisi masyarakat setempat, apakah kita berangkat dari potensi atau aktifitas rutin mereka. Ketika program di laksanakan sesuai dengan konteks masyarakat setempat, maka masyarakat lebih mudah dalam pembelajaran karena sudah mengakar di dalam diri mereka.

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat haruslah memiliki orientasi ke depan, mengapa program ini harus diadakan. Jika program diadakan, maka tentu dengan suatu maksud dan tujuan terhadap masyarakat itu sendiri. Masyarakat tentu memiliki semacam harapan untuk meningkatkan kualitas hidup. Adanya harapan untuk sampai pada kesejahteraan. Untuk mewujudkan harapan masyarakat maka perlunya bantuan dari pihak lain. Hill (1997:128) menggambarkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara dan mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai sebuah skema yang mengandung unsur; (1 Negara dalam bentuk pelayanan sosial oleh Negara, (2 pasar, dalam bentuk pelayanan sosial oleh dunia usaha, (3 Keluarga dan rumah tangga, dalam bentuk pelayanan sosial oleh keluarga dalam hubungan bertetangga: 4) sector sukarela: dalam bentuk kelompok swadaya, lembaga sukarela yang independen.

Tujuan pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya bukan pernyataan baru. Menurut Totok dan Poerwoko (2013: 109) bahwa ada beberapa tujuan dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Perbaikan pendidikan (*better education*)

Pendidikan menjadi faktor utama keberhasilan individu atau masyarakat, karena melalui pendidikan transfer pengetahuan, keterampilan serta sikap mampu ditumbuh kembangkan, melalui suatu mekanisme yang sudah teruji, kerusakan pada sector pendidikan, maka akan merusak ruh masyarakat itu sendiri, pengetahuan menjadi landasan dalam menentukan sikap atau tindakan

masyarakat. Ketika referensi dalam menentukan sikap kurang, maka akan mempengaruhi kinerja individu/masyarakat, karena dampaknya sulit untuk di prediksi. Setiap sektor-sektor inti di dalam masyarakat memerlukan pendidikan yang memadai, baik itu ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan dan budaya.

2. Perbaikan aksesibilitas.

Pada tatanan kehidupan sosial diperlukan suatu hubungan harmonis diantara seluruh komponen sehingga semua bagian dapat terkoneksi. Kebutuhan mendesak harus segera terpenuhi, hambatan aksesibilitas dapat menimbulkan berbagai macam persoalan sosial. Aksesibilitas untuk pendidikan contohnya, harus ada akses yang memudahkan masyarakat untuk mencapai pendidikan baik formal maupun nonformal. Sehingga akses untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dapat segera terpenuhi.

3. Perbaikan tindakan

Pendidikan sebagai salah satu instrument untuk mengubah tindakan-tindakan masyarakat yang merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Pendidikan juga menjadi upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang keliru. Kesalahan dalam bertindak dapat memberikan pengaruh besar bagi perkembangan suatu lingkungan. Contohnya tindakan anarkis ataupun fatalistik yang salah sasaran membuat ketidakseimbangan di dalam lingkungan masyarakat, dapat terjadi chaos, kekerasan dan kriminalitas. Maka

perlu tindakan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar memberikan efek positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

4. Perbaikan kelembagaan

Lembaga merupakan wadah yang memberikan masyarakat ruang untuk berekspresi atau pun berkarya, kehadiran suatu lembaga dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat, lembaga yang bermasalah dapat menyebabkan stagnansi ataupun kemunduran suatu masyarakat. Ketika program yang di jalankan tidak tepat sasaran, melakukan sabotase, maka akan merugikan masyarakat, sebagai contoh anggaran yang di berikan pemerintah yang di harapkan tersalurkan secara tepat, melenceng jauh, sehingga program-program pemberdayaan akan terhambat atau tidak memperoleh hasil yang maksimal.

Masalah pada sistem juga harus diperhatikan, ketika sistem yang diterapkan pada lembaga tidak meningkatkan kinerja struktural, maka hasilnya juga akan kurang maksimal, maka perbaikan kelembagaan menjadi begitu penting, demi mewadahi masyarakat untuk berkembang dan memiliki kapasitas untuk berkembang.

5. Perbaikan usaha

Usaha sebagai alternatif agar lebih mandiri perlu diperhatikan, dengan bekal pendidikan yang memberikan masyarakat kapasitas untuk berkembang, dapat dilakukan dengan lebih professional, melalui potensi alam misalnya, hasil panen dapat langsung di jual ke pasar tanpa harus melalui tengkulak

yang memainkan harga. Usaha dengan memainkan jasa rentenir juga harus dihindari karena pada akhirnya dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

6. Perbaikan pendapatan

Pendapatan akan dipengaruhi oleh kemampuan manajemen, sehingga peran pendidikan dalam memberikan pengetahuan manajemen menjadi sangat penting, masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi namun tidak memiliki manajemen yang baik juga akan menimbulkan banyak masalah, buruh di suatu perusahaan, akan memiliki kesempatan yang lebih baik jika mampu menabung pendapatannya lalu kemudian di gunakan untuk membuka usaha, karena PHK dapat terjadi kapan saja. Atau pendapatan dapat di investasikan ke hal-hal yang penting, tanah, rumah, emas misalnya.

7. Perbaikan lingkungan

Lingkungan adalah tempat dimana masyarakat tinggal, ketika lingkungan tidak terjaga dengan baik maka tentu saja dapat menimbulkan berbagai masalah seperti: bencana alam, wabah penyakit, dan kerusakan berbagai ekosistem. Tetapi ketika lingkungan terjaga dengan baik maka, akan terjadi keseimbangan alam di lingkungan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak, harus memperhatikan lingkungan alam, penggunaan secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan, sehingga lembaga berperan penting dalam mengawasi kondisi alam agar lingkungan tetap terjaga demi keberlanjutan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

8. Perbaikan kehidupan

Kesejahteraan merupakan cita-cita seluruh masyarakat, sampai detik ini pun kita melihat bahwa masalah kemiskinan masih menjadi momok menakutkan diseluruh negara. Sehingga masyarakat masih banyak yang hidup dalam kecemasan. Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik, di perlukan solusi agar masyarakat memperoleh keberdayaan, perbaikan pendidikan, kelembagaan, merupakan cara untuk sampai pada keberdayaan sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

9. Perbaikan masyarakat

Kehidupan sosial memiliki masalah yang begitu kompleks, baik itu karena individu maupun karena masyarakat itu sendiri. Perbaikan pendidikan, kelembagaan, hingga sampai pada kesejahteraan hidup akan memberikan efek positif bagi kehidupan sosial. Penggunaan akal sehat secara maksimal, serta kebutuhan yang sudah terpenuhi dapat memberikan efek positif dalam menjalani kehidupan masyarakat. Hal ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan konflik karena adanya kecemburuan sosial atau faktor lain yang sudah membudaya. Masyarakat akan fokus untuk bekerja dan memperoleh kehidupan yang layak.

d. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Ketika pemberdayaan masyarakat digagas, maka perlu mengetahui wilayah mana yang harus disentuh, karena kajiannya begitu luas. Setiap wilayah tentu

memiliki karakteristik berbeda, agar menjadi lebih efektif dan mudah memetakannya, maka perlu beberapa pendekatan untuk membatasi cakupannya. Menurut Totok & Poerwoko (2017: 160) pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan:

- 1) Pendekatan mikro: pemberdayaan dilakukan terhadap klien (penerima manfaat) secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management dan crisis intervention. Tujuannya untuk membimbing klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
- 2) Pendekatan mezzo: pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien (penerima manfaat) pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi.
- 3) Pendekatan makro: penerimaan manfaat di arahkan kepada system yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah strategi dalam pendekatan ini.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat disesuaikan melalui hasil pemetaan wilayah jangkauan. Strategi yang digunakan berbeda-beda pada setiap jumlah dan kualitas yang akan diberdayakan.

e. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kajian pemberdayaan masyarakat menuntut kita untuk berpikir secara sistemik dan komprehensif agar tidak menuai kegagalan pada saat penyelenggaraan. Perlu langkah-langkah dan strategi yang matang. Menurut

Totok & Poerwoko (2017: 169) pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan strategi:

- 1). Susun instrumen pengumpulan data, informasi dalam bentuk hasil penyelidikan, rujukan yang tersedia, penemuan lapangan; 2). Membina pemahaman, komitmen untuk menggalakkan kebebasan individu, kumpulan dan masyarakat; 3). Menyediakan sistem informasi, membangun sistem analisis, intervensi, pemantauan dan penilaian pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat

Faktor keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh langkah-langkah dalam menentukan keputusan dan strategi apa yang akan digunakan. Informasi menjadi faktor penting untuk menentukan keputusan dalam menentukan program. Pemberdayaan sebagai suatu perubahan yang terencana, dirinci oleh Lippit dalam Totok (2012: 123-124) kedalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyadaran. Itulah aktivitas untuk membuat orang menyadari kewujudan mereka bukan hanya sebagai individu dan ahli masyarakat, tetapi juga dalam upaya dilingkungan sosial, budaya dan ekonomi, 2) Menandai masalah. Itu adalah untuk menunjukkan masalah, terutamanya mengenai kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, 3) Membantu menyelesaikan masalah. Lakukan analisis masalah akar, penyelesaian alternatif, dan pilihan alternatif yang paling mungkin, 4) Menunjukkan kepentingan perubahan. Perubahan sebagai keperluan sejagat mesti dirancang dengan jangkaan, 5). Lakukan ujian dan demonstrasi. Aktivitas ini dijalankan untuk mengetahui aktiviti pemberdayaan yang paling berfaedah yang mempunyai risiko paling rendah, 6) Menghasilkan dan menyiarkan informasi. Penggunaan teknologi informasi diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan ciri-ciri benefisiari kaunseling, 7) Menjalankan pembinaan kuasa/kapasitas. Itu memberi peluang kepada masyarakat yang paling rendah untuk menentukan pilihan mereka.

Terdapat sebuah upaya penyadaran serta dukungan berupa motivasi agar masyarakat mampu berubah. Sehingga dapat di lihat sejauh mana perubahan itu terjadi, melalui evaluasi program. Penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

f. Indikator keberdayaan masyarakat

Menentukan keberdayaan atau tidak keberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari beberapa indikator. Menurut Givan dalam Totok & Poerwoko (2017: 289) indikator keberdayaan masyarakat adalah:

1). Kebebasan mobilitas: (upaya individu untuk mandiri, ke pasar, RS, bioskop, rumah ibadah); 2). Kemampuan untuk membeli komoditi kecil: (keperluan harian, keluarga, diri, dengan keputusan mereka sendiri); 3). Kemampuan untuk membeli komoditi besar: (upaya untuk membeli barangan tertieri dan sekunder (TV, radio, koran), dengan uang mereka sendiri); 4). Terlibat dalam keputusan rumah tangga: (pengubahsuaian rumah, pembelian ternakan dan kredit perniagaan); 5). Kebebasan relatif dari penguasaan keluarga: (melarang mempunyai anak, atau bekerja di luar rumah); 6). Kesadaran undang-undang dan politik: (mengetahui salah satu nama kerajaan atau rasmi); 7). Penglibatan dalam kampanye atau protes: (gaji tidak adil, salah guna pejabat); 8). Jaminan dan sumbangan ekonomi kepada keluarga: memiliki rumah, aset, simpanan.

Beberapa indikator diatas menegaskan bahwa keberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh kemandirian. Kemampuan masyarakat secara sadar dalam menentukan pilihan sendiri. Masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan uang hasil pendapatan sendiri. Masyarakat dapat memanajerial perekonomian rumah tangga dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Entoh Tohani, mengenai *Evaluasi Pelaksanaan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta*

Penelitian ini menggunakan model CIPP-nya Stufflebeam, et. Al (1986:177). Adapun hasil penelitian: Pertama, pelaksanaan program pendidikan PNF yang diselenggarakan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan karena adanya berbagai potensi di masyarakat seperti ekonomi, sosial dan budaya. Walaupun belum semua potensi digunakan, seperti potensi akademik. Kedua, dari ke tujuh program PNF yang diteliti, peserta didik adalah yang masih terbatas secara akademik dan ekonomi. Prosedur perekrutan peserta didik dilakukan oleh penyelenggara dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada penilik dan tokoh masyarakat, lalu mengidentifikasi peserta didik dan selanjutnya merekrut mereka secara langsung. Ketiga, pendidik/tutor memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya, memiliki keinginan untuk memajukan masyarakat dan memiliki status sosial yang penting di masyarakat. Mereka direkrut secara langsung oleh pengelola PKBM. Keempat, dari seluruh program yang dilaksanakan memiliki tujuan yaitu memberikan bekal keterampilan kepada warga belajar untuk dapat bekerja. Kelima, materi pembelajaran ditekankan pada pencapaian tujuan. Materi yang disampaikan dalam pembelajaran bersifat materi praktis. Materi tersebut dirumuskan dari materi yang sederhana ke yang lebih kompleks, dan juga dengan menekankan pada permasalahan yang dihadapi warga belajar (kontekstual). Keenam, terkait dengan materi, fasilitas dan media pembelajaran diberikan untuk memudahkan penguasaan materi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa program pendidikan PNF memberikan dampak dalam memberdayakan masyarakat. Program PNF memberikan manfaat

kepada peserta didik hingga mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, hal ini memudahkan peserta didik untuk bekerja baik mandiri maupun bersama orang lain. Lalu terjadi beberapa kendala seperti kurangnya dukungan pemerintah lokal maupun nasional terhadap pelaksanaan program PNF. Dukungan hanya dari mitra hanya sebagai pada kegiatan program tertentu. Oleh karena itu, sejak awal penyelenggaraan program perlu memperhatikan keterlibatan mitra guna kemudahan pencapaian tujuan program pendidikan.

Penelitian ini sama-sama mengkaji program PNF dalam memberdayakan masyarakat, dimana berdasarkan masalah yang dialami masyarakat. Peserta didik direkrut berdasarkan konsultasi dengan tokoh masyarakat lalu direkrut secara langsung. Pemilihan tutor juga dengan melihat bidang keilmuannya. Peserta didik diberikan bekal, pengetahuan dan keterampilan untuk memperoleh pekerjaan. Penelitian ini pun melakukan metode evaluasi CIPP untuk melihat berbagai komponen yang ada dan mempengaruhi program. Hambatan yang di temukan pun hampir serupa, yakni masih kurangnya dukungan dari pemerintah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah, Ahmad Sofyan, Hasyim Asy'ari, mengenai: *Evaluating Equal Education Certification for Indonesian Formal Education by Using CIPP Model*

Evaluluasi penelitian ini menggunakan model evaluasi Stufflebeam dan Shinkfield yaitu model CIPP. Hasil program memperlihatkan bahwa keberadaan program Paket C membawa dampak yang baik. Di dalam masyarakat, konteks relevansi kehadiran program Paket C di masyarakat sekitar Lebak Bulus sangat

diperlukan dan menjadi bagian penting dari pendidikan yang membantu memberikan layanan yang sama bagi orang-orang dengan latar belakang ekonomi, geografis, demografi, dan psikologis. Pada komponen input, unsur-unsur yang terlibat adalah ketua yayasan, kepala PKBM, Administrator, Tutor atau narasumber teknis, dan para peserta didik yang memiliki kegiatan sesuai standar bimbingan teknis. Pada komponen input lainnya, fasilitas infrastruktur yang tersedia telah terpenuhi, dan memberikan ketertarikan peserta didik belajar. Pada komponen proses, sistem manajerial program manajemen paket C tidak sesuai dengan standar implementasi dalam aspek perencanaan, ketersediaan, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur. Pada komponen Proses: Aktivitas pembelajaran tidak sepenuhnya mengikuti kurikulum yang disediakan, hanya terfokus pada diskusi tentang materi PBB. Lalu pada komponen produk, aspek nilai peserta didik mengalami penurunan meskipun setiap tahun lulusannya lebih dari 90%.

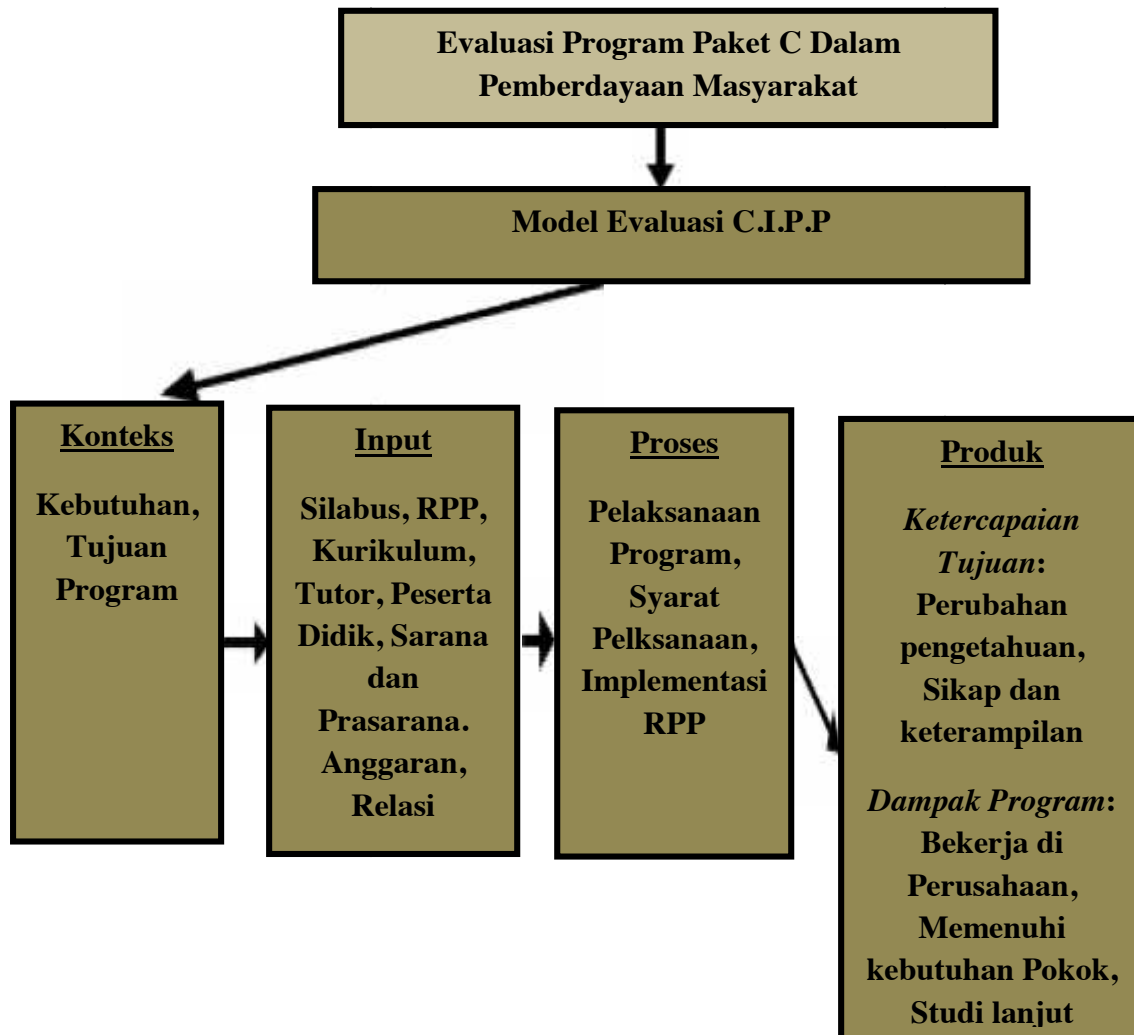
Penelitian ini sama-sama mengevaluasi program paket C melalui metode C.I.P.P, di mana konteks program di lihat dari kebutuhan masyarakat, komponen input mengkaji tentang tutor, peserta didik, sarana dan prasarana. Pada komponen proses kajian ada pada keterlaksanaan rencana, proses pembelajaran. Pada komponen produk adalah dengan melihat nilai peserta didik yang mencapai standar atau dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah paket C.

3. Tesis yang dibuat oleh Djuwalman, mengenai: *Evaluasi program paket C setara SMA di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Bantul*

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan model C.I.P.P dari Stufflebeam, hasil penelitian menunjukkan: (1). Konteks: kebutuhan masyarakat terhadap program paket C tinggi, tetapi partisipasi masyarakat pada program paket C rendah, (2). Input: karakteristik warga belajar dilihat dari latar belakang, pendidikan dan usia memenuhi kriteria dan masuk kategori baik, sedangkan motivasi warga belajar masuk dalam kategori kurang, karakteristik tutor dilihat dari pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kesesuaian bidang studi dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman latihan yang pernah diikuti masuk kategori baik,(3). Proses: aktivitas warga belajar masih kategori kurang, sedangkan aktivitas tutor masih dalam kategori cukup, (4). Produk: prestasi akademik warga belajar masuk dalam kategori cukup, sementara manfaat yang dialami warga belajar masuk kategori cukup dan bermanfaat.

Penelitian ini sama-sama melakukan evaluasi program paket C dengan menggunakan metode C.I.P.P dimana terdapat kesamaan pada komponen konteks, yakni tentang kebutuhan, lalu inputnya adalah peserta didik, tutor, dan penyelenggara. Sedangkan pada proses adalah aktivitas program, dan pada produk adalah prestasi akademik yang menjadi penilaian serta manfaat dari adanya program.

C. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

D. Pertanyaan Evaluasi

1. Pertanyaan pada aspek konteks:

- a. Apakah program sesuai dengan kebutuhan peserta didik?
- b. Apakah program sudah sesuai dengan potensi alam?
- c. Apa yang menjadi tujuan pengurus PKBM mengadakan program paket C?
- d. Apa tujuan peserta didik ikut program paket C?
- e. Apakah peserta didik ikut program karena kemauan sendiri?
- f. Apa yang menjadi motif peserta didik ikut program paket C?

2. Pertanyaan pada aspek input:

- a. Bagaimana Silabus yang dirancang oleh Tutor?
- b. Bagaimana RPP yang dirancang oleh Tutor?
- c. Bagaimana model kurikulum yang di rancang oleh Tutor?
- d. Bagaimana latar belakang peserta didik?
- e. Berapa Jumlah Peserta Didik?
- f. Bagaimana latar belakang tutor?
- g. Berapa Jumlah Tutor?
- h. Sarana Prasarana apa yang tersedia, baik dari lembaga maupun instansi/swasta?
- i. Bagaimana bentuk dan pengelolaan anggarannya?
- j. Siapa saja pihak yang terlibat ketika menyelenggarakan program?

3. Pertanyaan pada aspek proses:

- a. Apakah program terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan?
- b. Apakah program diselenggarakan sesuai dengan standar proses pembelajaran paket C?
- c. Bagaimana hubungan antara tutor dan peserta didik pada saat proses pembelajaran?
- d. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia memudahkan dan membuat nyaman peserta didik serta tutor pada saat pembelajaran?
- e. Apakah anggaran yang tersedia disalurkan sesuai kebutuhan pada saat pelaksanaan program?
- f. Bagaimana kemampuan tutor pada saat pelaksanaan program?
- g. Apakah peserta didik aktif bertanya pada saat pembelajaran dan diskusi?

4. Pertanyaan pada aspek produk:

- a. Apakah peserta didik mengalami perubahan pada pengetahuan, keterampilan dan sikap?
- b. Apakah peserta didik sudah bekerja di salah satu perusahaan setelah mengikuti program?
- c. Apakah peserta didik mampu memenuhi kebutuhan pokoknya?